BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Permasalahan stunting di Indonesia telah menjadi isu prioritas nasional, termasuk di tingkat desa. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Desa Puty sebagai bagian dari Kabupaten Luwu turut menjalankan program ini dengan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan intervensi gizi, pelayanan kesehatan dasar, serta pemberdayaan kader. Meskipun secara administratif telah mengikuti siklus pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam PMK 145 Tahun 2023, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, kader, dan masyarakat, ditemukan bahwa belum semua pihak memiliki pemahaman dan keterlibatan yang utuh dalam proses program. Beberapa warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan maupun evaluasi. Selain itu, penyaluran bantuan tidak selalu tepat sasaran, dan kegiatan rutin seperti pemberian makanan tambahan sering tertunda karena pencairan dana tidak berjalan tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pembenahan kebijakan dan penguatan kapasitas pada tingkat desa. Kepala desa bersama perangkatnya perlu membangun sistem partisipatif dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, serta lembaga desa lainnya dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pendataan melalui pemutakhiran data by name by address yang dilakukan oleh petugas pendataan desa bekerja sama dengan kader

kesehatan dan pihak puskesmas**.** Di sisi lain, kebijakan penganggaran harus diarahkan pada penciptaan fleksibilitas melalui penetapan dana siap pakai untuk kegiatan prioritas yang bersifat mendesak. Transparansi informasi oleh pemerintah desa juga menjadi kunci agar masyarakat dapat turut mengawal program dan menumbuhkan rasa memiliki.

B. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan dimasyarakat yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup di masa depan. Oleh karena itu, di tingkat desa stunting menjadi isu prioritas yang segera ditangani melalui intervensi nyata dan pengelolaan sumber daya yang tepat sasaran.

Di Desa Puty, yang terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, stunting telah menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menyatakan bahwa anggaran khusus untuk stunting telah diakomodasi dalam APBDes sebagai program prioritas. Melalui wawancara dengan bendahara, sekretaris desa, dan bidan desa, diketahui bahwa dana stunting digunakan untuk pelatihan kader, pemberian makanan tambahan, insentif kader posyandu, serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan di posyandu.

Namun, temuan dari masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak menerima bantuan yang dijanjikan seperti vitamin, edukasi gizi, atau makanan tambahan. Lebih lanjut, masyarakat juga mengaku tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi program. Dana sering disalurkan tidak tepat waktu karena bergantung pada pencairan dana desa, sehingga beberapa kegiatan harus tertunda atau tidak berjalan maksimal.

Situasi ini menandakan adanya celah antara kebijakan, perencanaan teknis, dan realisasi di lapangan. Maka dari itu, diperlukan perbaikan dalam tata kelola program stunting berbasis dana desa, terutama dalam aspek transparansi, pelibatan masyarakat, serta ketepatan waktu dan sasaran.

C. Deskripsi masalah

1) Rendahnya Partipasi Masyarakat

Masalah pertama yang mengemuka adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga seperti Ibu Wulan, Ibu Rusmianti, dan Ibu Mutma, diketahui bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa terkait evaluasi program stunting. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih dilakukan secara *top-down*, dengan menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan kebutuhan riil masyarakat.

2) Tidak meratanya distribusi manfaat program stunting

Dalam wawancara dengan informan warga dan kader posyandu, terungkap bahwa beberapa ibu tidak pernah menerima bantuan makanan tambahan, vitamin, ataupun informasi tentang kegiatan stunting. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembaruan data sasaran secara berkala. Pemerintah desa masih menggunakan data lama yang tidak mencerminkan kondisi terkini di lapangan, sehingga kelompok yang seharusnya menjadi prioritas justru terlewatkan.

3) Penyaluran dana program stunting yang tidak konsisten dan tidak tepat waktu

Penyaluran dana sangat bergantung pada pencairan dana desa dari pemerintah pusat. Dari hasil wawancara dengan bendahara desa dan

sekretaris desa, diketahui bahwa kegiatan seperti PMT kerap tertunda karena pencairan dana desa tidak sesuai jadwal. Ketika dana baru cair di pertengahan tahun, maka kegiatan yang seharusnya bersifat rutin dan berkesinambungan menjadi tidak terlaksana tepat waktu, sehingga tujuan program men jadi tidak tercapai secara maksimal.

4) Alokasi belum sepenuhnya mandiri

Dana desa digunakan untuk kegiatan seperti PMT, insentif kader, dan sarana posyandu.namun, kegiatan edukasi gizi dan penyuluhan tidak dibiayai dari dana desa, melainkan dari puskesmas atau program KKN.

5) Laporan belum transparansi dan sulit diakses masyarakat

Bendahara desa rutin membuat laporan keuangan, tetapi publikasi laporan masih terbatas. Informasi yang dipajang hanya bersifat umum, tanpa rincian kegiatan. Masyarakat sebagai penerima manfaat tidak bisa memantau penggunaan dana secara detail, sehingga akuntabilitas program menjadi lemah.

D. Rekomendasi kebijakan

1) Penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses

Pemerintah desa dapat memasang papan informasi resmi yang berisi data dan jadwal program stunting di lokasilokasi strategis yang sering dikunjungi warga, seperti balai desa, posyandu, dan sebagainya. Informasi yang ditampilkan bisa berupa daftar kegiatan misalnya, jadwal posyandu, pemberian makanan tambahan, alokasi dana serta hasil evaluasi program.

Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah papan informasi rentan tidak diperbarui secara berkala, sehingga isinya bisa menjadi kadaluarsa dan tidak relevan. Selain itu, informasi yang bersifat teknis atau administratif kadang sulit dipahami

oleh masyarakat umum, terutama yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Jangkauan kebijakan ini juga terbatas, karena tidak semua warga mengunjungi balai desa atau tempat umum lainnya secara rutin. Di samping itu, papan informasi dapat mengalami kerusakan karena faktor cuaca atau vandalisme, sehingga memerlukan pengawasan dan perawatan rutin.

2) Memperbarui basis data sasaran program stunting secara berkala menggunakan pendekatan *by name by adress* (BNBA)

Pemutakhiran data sasaran program stunting menggunakan pendekatan *by name by address* (BNBA) merupakan kebijakan strategis untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan melibatkan kader dan ketua RT dalam melakukan pendataan rumah ke rumah setiap tiga atau enam bulan, data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan. Keunggulan utama dari kebijakan ini adalah meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan, mencegah bantuan ganda, dan meningkatkan efektivitas program. Data BNBA juga memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan dan pengambilan keputusan berbasis bukti nyata.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga memiliki tantangan. Proses pendataan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan karena harus dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Jika tidak dilaksanakan secara objektif dan sistematis, data yang dikumpulkan bisa menjadi bias atau tidak valid. Selain itu, perubahan data penerima manfaat bisa menimbulkan kecemburuan atau protes dari warga yang merasa tidak lagi menerima bantuan. Tanpa adanya mekanisme validasi dan

penghapusan data ganda, pendataan ini juga berisiko menimbulkan duplikasi penerima yang bisa merusak integritas program.

3) Menetapkan Dana Siap Pakai (DSP)

Khusus untuk kegiatan seperti PMT, penyuluhan Gizi, dan layanan posyandu. Dana ini dialokasikan dari dana desa tahap I dan dikelola secara fleksibel untuk menjamin kegiatan berjalan tanpa tergantung pada pencairan tahap berikutnya. DSP ini digunakan sebagai cadangan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan agar tidak terganggu ketika terjadi keterlambatan pencairan dana. Kelemahan dari kebijakan ini adalah keterbatasan nominal DSP karena hanya bersumber dari dana desa tahap I, bisa saja nilai nya tidak cukup jika banyak kegiatan prioritas lainnya